

**PERGULATAN PEREMPUAN DUSUN MELAWAN KEMISKINAN:  
Dari Eksploitasi Diri Sampai Negosiasi**

**M. Khusna Amal**

*Kepala Pusat Pengabdian dan Pengembangan Kepada Masyarakat (P3M)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember*

**Abstract**

*Modernization of agriculture has resulted in an amazing progress of the growth and development of rural society's economics. Agriculture management with the use of modern techniques and technologies has been successful in increasing the productivity of agricultural products, especially rice, two-fold. In the long term, however, agricultural modernization fails in the same time to preserve natural environmental balance and to lead just prosperity and fairly-spread progress. Even contra-productively, it also plays role to lead the pitfall of structural poverty for the small-scale farming communities. Such condition triggers the massive urbanization. Rural citizens massively move to urban regions for job. And ironically, it's women that suffer much from the burdening impacts of poverty's condition. Not few women work hard as TKW (Indonesian Female Labor) to make money for fulfilling their family's basic need of life. Meanwhile, those who are left by their husbands migrating for job, have also to work hard in their homes.*

*However, it seems that rural women greatly endure suffering from the bad condition and playing their double-role. Working hard, helping each-others by holding arisan, etc., are the strategies of rural women of Tenggiling Sawo in their response to poverty. The intensive involvement of the rural women in the problem of poverty constructs, either directly or indirectly, a new consciousness. A consciousness in which they realize that their existence as social creature is such an equal to the existence of men that they aware that they should have fair role in social life. However, such consciousness could not enable the rural women yet to take concretely social actions for just structure of their gender relation in their social life.*

**Kata Kunci:** Perempuan Dusun, Kemiskinan, Eksploitasi Diri, dan Negosiasi

## PENDAHULUAN

**M**odernisasi pertanian di pedesaan telah membawa kemajuan menakjubkan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan pertanian dengan bantuan teknik dan teknologi modern telah berhasil meningkatkan produktivitas hasil pertanian, terutama padi, dua kali lipat. Namun, dalam jangka panjang, modernisasi pertanian ternyata tidak dapat membawa kelestarian, kemajuan, dan kemakmuran yang berkeadilan. Kemajuan pertanian hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu, mereka antara lain adalah tuan tanah dan para pemilik modal dari luar desa. Sementara, bagi masyarakat desa yang umumnya berprofesi sebagai petani kecil (baca: petani gurem) ataupun buruh tani kurang mendapatkan manfaat mendasar dari gerak modernisasi pertanian. Secara kontra-produktif, modernisasi pertanian justru berperan dalam melangengkan struktur kemiskinan yang semakin absolut bagi petani kecil (Susetiawan, 1999: 12, Mansour Fakih, 2002: 70).

Kondisi demikian itu yang kemudian mengakibatkan terjadinya ledakan urbanisasi ataupun migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota ataupun ke daerah lain untuk mendapatkan pekerjaan sebagai buruh migran. Tercatat, para migran itu adalah laki-laki dan perempuan yang rata-rata berusia muda (baca: produktif). Dalam beberapa kasus, di suatu daerah tertentu para migran banyak dari kalangan laki-laki, dan di daerah lain, para migran lebih banyak dari kalangan perempuan. Sementara, kasus di pedesaan miskin di dusun Tenggiling Sawo, Jember, para migran banyak berasal dari kaum laki-laki. Terlepas dari laki-laki ataukah perempuan yang melakukan migrasi, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah betapa kemiskinan di desa dan migrasi yang dilakukan sebagian penduduk desa telah menciptakan beban berat bagi kelangsungan hidup keluarga miskin di pedesaan. Dan, perempuanlah yang terkena dampak paling serius dalam memikul beban berat kemiskinan keluarga. Satu sisi, perempuan dituntut untuk menangani urusan rumah tangganya. Di sisi lain, mereka harus berjuang ekstra keras di desa untuk mencukupi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarganya.

Lebih lanjut, tulisan ini hendak mendeskripsikan perjuangan perempuan Tenggiling Sawo dalam membangun "subyek kekuasaan" dirinya guna menghadapi realitas kemiskinan keluarganya. Setidaknya, terdapat dua pola tindakan yang dilakukan perempuan dalam merespon kemiskinan, yaitu eksploitasi diri dan nego*s*iasi. Kedua tindakan ini diarahkan bukan sekedar untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya, melainkan sekaligus juga dalam usahanya melakukan resistensi terhadap pola relasi sosial yang menjadikan dirinya

subordinatif, baik dalam keluarga, masyarakat, dan dunia kerja.

### Tenggiling Sawo dalam Lintasan Modernisasi

Sejak jaman kolonialisme Belanda, Jember yang memiliki luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>, menjadi salah satu kawasan penting di belahan timur dari Jawa Timur, yang dieksploitasi Belanda untuk peningkatan akumulasi kapitalnya. Topografi daerahnya yang datar, sebagian berbukit dan bergunung, hawanya yang sejuk, curah hujan yang mencukupi, dan kondisi tanahnya yang subur (Baped & BPS, 2007: 3), dieksplorasi Belanda menjadi kawasan pertanian, perkebunan, perdagangan dan industrialisasi. Di daerah yang tidak berbukit, Belanda membuka areal pertanian untuk tanaman padi, tembakau, dan tebu. Sementara di areal perbukitan, Belanda membuka areal perkebunan untuk tanaman karet, kopi, cengkeh, cokelat, palawija, dan semacamnya.

Untuk mendukung politik pertanian dan perkebunannya itu, Belanda lantas membangun saluran irigrasi modern, sarana transportasi terutama jalan raya dan rel kereta api yang menghubungkan tidak saja antar daerah di Jember, tetapi juga antar daerah di luar Jember, seperti Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, sampai Surabaya. Belanda juga mendirikan pabrik gula, pabrik pengolahan kopi dan kakau, dan pabrik pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Sarana pengolahan lahan pun mulai dilakukan secara modern dengan dukungan peralatan mesin yang modern pula. Hasilnya, pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan industrialisasi mengalami peningkatan luar biasa. Bahkan, Jember saat itu masuk ke dalam jajaran daerah pemasok hasil pertanian dan perkebunan, terutama kopi dan tembakau, yang diperhitungkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Khusus terkait dengan tembakau, yang memang menjadi produk andalan pertanian Jember, pemerintahan Hindia Belanda tidak tanggung-tanggung menginvestasikan modalnya. Setidaknya terdapat empat perusahaan partikelir yang menginvestasikan modalnya untuk pembudidayaan tembakau di Jember, yaitu: *De Landbouw Maatschappij* Soekowono milik Fransen van de Putte, *De Landbouw Maatschappij* Jelbuk milik Du Ry van Best Holle dan Geertsma, *De Landbouw Maatschappij* Soekokerto Ajong milik keluarga Baud, *De Landbouw Maatschappij Oud Djember* milik George Birnie (Tri Chandra, 2004: 1-15).

Di samping membutuhkan sarana pengelolaan pertanian dan perkebunan berbasis mesin modern, Belanda juga masih memerlukan banyak tenaga manusia untuk dipekerjakan di perkebunan dan pertanian. Karena itu, Belanda kemudian

mendatangkan pekerja yang terkenal ulet, bekerja keras, dan mau dibayar murah, dari daerah Madura dan Jawa (Tri Chandra, 2004: 1-15). Para migran dari Jawa dan Madura lantas banyak yang memutuskan untuk tidak pulang ke daerah asalnya. Banyak dari mereka yang kemudian menetap di berbagai kawasan di daerah Jember menjadi buruh perkebunan dan pertanian yang dikelola Belanda. Para migran Jawa dan Madura inilah yang di kemudian hari menjadi penduduk daerah Jember. Dengan demikian, Jember merupakan daerah baru yang mayoritas penduduknya adalah kaum urban atau migran dari Jawa, Madura, dan sebagian Using Banyuwangi.

Tenggiling Sawo yang merupakan bagian dari wilayah Jember, terkena dampak secara langsung dari kebijakan modernisasi pertanian dan perkebunan yang dijalankan Belanda. Sebagian besar kawasan di daratan kaki gunung Argopura, termasuk di dalamnya Tenggiling Sawo, yang awalnya hutan dibabat untuk dijadikan kawasan perkebunan. Kawasan perkebunan baru ini lantas ditanami kopi, cokelat, dan karet. Sedangkan, dataran rendahnya dijadikan sebagai kawasan hunian bagi para pekerja (baca: buruh migran) yang didatangkan dari Jawa dan Madura. Daerah Tenggiling Sawo, sebagian tanahnya dijadikan kawasan hunian bagi para buruh migran di perkebunan Belanda, dan sebagian lagi dijadikan areal perkebunan kopi. Bagi para migran yang menetap di kawasan Tenggiling Sawo, mereka harus membeli tanah yang ditematinya kepada pemerintahan Belanda dengan cara mengangsur melalui potongan upah kerja. Karena itu, seluruh warga yang sekarang tinggal dan menetap di Tenggiling Sawo itu sesungguhnya merupakan kaum migran atau urban yang aslinya berasal dari Jawa dan Madura.

Pasca kemerdekaan, areal perkebunan yang dikelola Belanda di kawasan sekitar gunung Argopura kemudian diambil alih oleh pemerintah untuk selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada Perhutani dan sebagian lagi dikelola PTP. Kawasan pegunungan yang ditanami hutan lindung dikelola Perhutani. Sedangkan kawasan di sekitar kaki gunung dikelola PTP sebagai areal perkebunan kopi dan cokelat.

Sementara itu, warga yang dulunya menjadi buruh di perkebunan Belanda yang menetap di kawasan sekitar perkebunan, termasuk Tenggiling Sawo, sebagian ada yang tetap menjadi buruh perkebunan milik PTP dan sebagian lagi mengelola lahan pertanian yang telah dimilikinya. Bagi warga yang membeli lahan garap, mereka mengelolanya untuk ditanami padi dan palawija. Sedangkan, bagi warga yang tidak berkesempatan dan/atau mampu membeli lahan garap, mereka menjadi buruh perkebunan di PTP dan ada pula yang menjadi buruh tani. Bagi sebagian besar warga Tenggiling Sawo yang memiliki lahan garap, rata-rata kepemilikan

lahan mereka hanya 250 s.d 500 M<sup>2</sup>.

Pada periode 1970-an, ketika pemerintahan Orde Baru mengembangkan kebijakan modernisasi pertanian yang dikenal dengan Revolusi Hijau (Green Revolution) (Mansour Fakih, 2002: 273-274), maka dampaknya juga dirasakan warga Tenggiling Sawo. Lewat kebijakan pemerintah daerah dan desa, warga lambat laun meninggalkan pola pengelolaan pertanian lama, dan mengadopsi sistem pengelolaan pertanian baru. Pengelolaan pertanian lantas mulai mengadopsi pemanfaatan benih unggul, pupuk kimia, dan obat-obatan pestisida. Hasilnya, panen padi dan hasil pertanian mengalami peningkatan berlipat ganda.

Akan tetapi, selang beberapa tahun berikutnya, warga mulai merasakan kesulitan dalam penggarapan lahannya. Hasil panen memang meningkat dua kali lipat, tetapi harga gabah dan hasil pertanian lainnya seperti kedelai, jagung, dan lainnya dihargai murah. Biaya pengelolaan dan harga pupuk pun semakin tidak terjangkau kemampuan finansial petani kecil. Untuk dapat mempertahankan pengelolaan lahan garapnya, warga banyak yang memilih untuk meminjam modal kepada para petani kaya ataupun pemilik modal. Dalam konteks ini, tepat apa yang diungkapkan Mansour Fakih, bahwa Modernisasi pertanian juga semakin meningkatkan ketergantungan para petani kecil di pedesaan terhadap para pemilik modal di perkotaan. Dalam banyak hal, petani gurem di desa sangat bergantung kepada para pemilik industri pertanian yang menyediakan bibit, pupuk, dan kelengkapan mesin pertanian. Untuk mendapatkan bibit unggul, misalnya, petani tidak lagi bisa menyediakannya sendiri. Melainkan harus membelinya dari pihak pemegang hak paten yang tiada lain adalah perusahaan-perusahaan besar milik pengusaha multi nasional Barat. Akibatnya, petani yang telah hidup selama 5000 tahun memproduksi, menyeleksi, menyimpan, dan menanam kembali benih mereka, secara dramatik tergusur dan musnah (Mansour Fakih, 2002: 274-275).

Bertolak dari keprihatinan tersebut, maka banyak petani yang kemudian memiliki asumsi bahwa "tanah" tidak bisa lagi diandalkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kerja di sektor pertanian pedesaan juga tidak banyak memberikan prospek dan jaminan sosial bagi kelangsungan dan peningkatan taraf hidup mereka. Karena itulah pada akhir 1980-an, mulai ada satu sampai dua orang dari warga yang berinisiatif untuk bermigrasi meskipun harus menggadaikan ataupun menjual tanah garap miliknya.

## **Era Migrasi Baru**

Tindakan beberapa orang Tenggiling Sawo dalam melakukan migrasi ke daerah lain, ternyata memberikan inspirasi bagi warga lainnya untuk mengikuti jejaknya. Kedatangan kembali orang-orang yang bermigrasi untuk mengunjungi kampung halamannya, Tenggiling Sawo, dengan menampilkan diri sebagai orang yang berhasil secara ekonomi dan cerita keberhasilan yang mereka bangun dengan sesama warga, melalui obrolan santai di warung, rumah, masjid, dan tempat-tempat publik lainnya, turut mempengaruhi sebagian warga untuk mengikuti jejaknya. Ditambah lagi, pengalaman pribadi warga yang selama ini bertahan di dusun yang senantiasa dihadapkan pada kesulitan hidup yang kian tak terbantahkan, menjadi pertimbangan tersendiri bagi mereka untuk melakukan migrasi. Terlebih, ada tawaran dari saudara mereka yang terlebih dahulu migrasi untuk mencari lapangan pekerjaan dan penampungan bagi mereka.

Dalam perkembangan berikutnya, jumlah warga Tenggiling Sawo yang bermigrasi mengalami peningkatan. Kalau, dalam dasawarsa 1980-an, para migran dapat dihitung dengan jari, sekitar satu sampai dua orang saja, maka pada dasawarsa 1990-an, arus migrasi mengalami peningkatan cukup tajam. Jumlah warga yang bermigrasi mencapai angka di atas 80-an orang. Mereka yang bermigrasi tidak saja berasal dari warga yang tidak memiliki lahan dan pekerjaan mantap. Banyak pula warga yang memiliki lahan sempit memilih migrasi. Lantas, lahan sepetak dua petak yang dimilikinya ada yang disewa-gadaikan, ada pula yang dijual. Bahkan pada periode 2000-an, jumlah migran mencapai 75% dari jumlah 125 Kepala Keluarga (KK). Dan kebanyakan yang melakukan migrasi adalah kaum laki-laki, kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan perempuan, terutama ibu rumah tangga, tetap tinggal di dusun, mengurus keluarganya.

Derasnya arus migrasi warga Tenggiling Sawo pada setiap tahunnya, puncaknya pada periode 2000-an sebagaimana digambarkan di atas, jelas bukan semata berkelindan dengan cerita sukses yang dibawa kaum migran sepulang ke kampung halamannya. Tidak sedikit dari para migran yang pulang ke kampung halamannya sekedar untuk mengunjungi keluarganya menceritakan sisi lain dari kehidupan migrasi yakni kepahitan hidup dan kesengsaraan bekerja di daerah migran. Hampir semua warga yang migrasi bekerja di sektor informal yang sama sekali tidak menjanjikan. Mereka bekerja sebagai buruh migran yang berkutut dengan kerja-kerja kasar seperti buruh perkebunan, kuli bangunan, buruh pertambangan batu bara, dan semacamnya. Memang, upah yang mereka terima nilainya jauh lebih tinggi daripada upah bekerja di sektor informal di daerah

Jember. Tetapi, kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi di daerah migran, meski hanya seorang diri, juga sangat tinggi. Belum lagi kalau mereka mengalami sakit ataupun kecelakaan, tidak ada jaminan sosial semacam asuransi yang dapat meringankan beban mereka. Semuanya harus ditanggung oleh mereka sendiri kapasitasnya sebagai pekerja kasar.

Meski demikian, tetap saja bagi kebanyakan warga Tengggiling Sawo yang sudah berumah tangga tindakan bermigrasi merupakan pilihan yang paling rasional dibandingkan jika mereka harus bertahan di dusun dan bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan milik PTP, ataupun menggarap lahan yang luasnya hanya 250 sampai 500 M<sup>2</sup>. Dikelola seperti apapun luas tanah yang sangat sempit tersebut tidak akan pernah mampu menghasilkan produk pertanian yang mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Untuk kebutuhan makan saja, luas tanah seperti itu jelas tidak akan pernah mencukupi. Apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarganya. Kota ataupun daerah migran tetap dipandang sebagai pusat kekuasaan yang memiliki hak-hak istimewa dibandingkan dengan pedesaan (Alan Gilbert & Josef Gugler, 1996: 55-67).

Meningkatnya arus migrasi di Tengggiling Sawo pada periode 1990 dan 2000-an juga bertalian erat dengan kegagalan modernisasi pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam menciptakan kemakmuran yang berkeadilan. Praktek pembangunan yang bertumpu pada pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi telah menjadikan kota dan daerah-daerah strategis sebagai kawasan maju yang pada giliraanya banyak didatangi para migran. Sementara, daerah-daerah pedesaan dan kawasan tertinggal cenderung semakin terabaikan, terpinggirkan dan teralienasi (Alan Gilbert & Josef Gugler, 1996: 53). Implikasinya, banyak warga desa yang kemudian memilih melakukan migrasi dari desa ke kota atau daerah lain yang lebih strategis secara ekonomi. Pengalaman Tengggiling Sawo sendiri dalam lintasan modernisasi pembangunan mulai era kolonialisme sampai sekarang ini menunjukkan fenomena semacam itu. Pada era kolonialisme Belanda, kawasan di sekitar Tengggiling Sawo, terutama di kaki gunung Argopura, dibuka sebagai kawasan perkebunan yang sangat produktif. Awalnya, para migran didatangkan oleh pemerintah Belanda dari Jawa dan Madura untuk bekerja di perkebunan. Tetapi, dalam perkembangan berikutnya, banyak migran yang datang sendiri untuk mencari pekerjaan ke kawasan Tengggiling Sawo dan Jember yang merupakan daerah yang potensial secara ekonomi. Kini, Tengggiling Sawo yang dulunya merupakan kawasan molek secara ekonomi yang didatangi para migran hingga menetap menjadi penduduk asli, berubah menjadi perkampungan miskin yang ditinggalkan

warganya bermigrasi ke daerah lain.

### **Peran Perempuan**

Praksis, setelah ditinggal migrasi suaminya, kaum perempuanlah yang menanggung beban kehidupan seluruh anggota keluarganya yang tinggal di dusun. Mereka tidak saja mengurus kerjaan rumah seperti memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Mereka juga dituntut untuk menangani urusan pendidikan anak-anaknya, kesehatan anggota keluarganya, dan jaminan keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarganya. Penting dicatat bahwa rata-rata keluarga miskin di Tenggiling Sawo tidak hanya terdiri dari keluarga inti (baca: keluarga batih), di mana hanya ada suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam satu keluarga, minimal terdiri dari keluarga inti (suami, istri, dan anak) ditambah sebagian dari anggota keluarga non-inti (bisa dari orang tua/mertua, adik suami atau adik dari istri, kakek nenek dari suami ataupun dari sebelah istri).

Dalam kesehariannya, semua beban pengurusan kehidupan anggota keluarganya itu menjadi tanggung jawab perempuan sebagai kepala rumah tangga. Beban perempuan kian bertambah berat mengingat uang kiriman dari suaminya, tidak rutin setiap satu bulan. Terkadang, dua bulan sekali, tiga bulan sekali, bahkan ada yang sampai lima bulan sekali. Tergantung situasi dan kondisi kerjaan suami di rantauan. Menurut beberapa suami yang kebetulan lagi pulang kampung (baca: mudik), hasil kerja yang mereka peroleh di daerah migran memang lebih besar daripada upah yang mereka peroleh dari hasil kerja kasar di daerah Jember. Namun demikian, kebutuhan hidup di daerah migran ternyata juga sangat tinggi. Karena itulah, uang yang dikirimkan ke istri di dusun sering tidak mencukupi. Sebulan gaji yang diperoleh suami sebagai buruh migran sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kebutuhan suami untuk survive di rantauan dalam sebulannya minimal menghabiskan dana Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dihadapkan pada situasi demikian itu, tidak banyak pilihan lain yang dapat dilakukan perempuan kecuali melakukan kerja keras dengan mendayagunakan anggota keluarganya yang mampu bekerja. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana kehidupan keluarga tetap terus berlangsung. Sementara impian mereka untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang perguruan tinggi, dan membangun rumah dengan perabotan yang lebih layak, harus dikesampingkan terlebih dahulu. Setidaknya terdapat dua strategi mendasar yang dilakukan perempuan Tenggiling Sawo dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya, yaitu: melakukan kerja keras sebagai bentuk self

exploitation dan negosiasi membangun kesetaraan.

### 1. *Self Exploitation*

Hampir semua kaum hawa di Tenggiling Sawo, mulai dari ibu-ibu, laki-laki usia lanjut, sampai anak-anak usia belia, terlihat sibuk bekerja sejak pagi hingga petang hari. Di pagi hari, ibu-ibu sudah sibuk di dapur memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Anak perempuan kebagian kegiatan bantu-bantu di dapur atau menjaga adiknya yang masih kecil. Anak laki-lakinya kebagian pekerjaan menyapu, memberi makan ternak ayam, mencari air, bahkan sampai mencuci piring. Semua itu, dilakukan anak-anak sebelum mereka berangkat ke sekolah. Pun, setelah selesai sekolah, mereka juga masih dituntut untuk ikut kerja membantu ibunya bekerja di sawah, kebun, ladang dan lain-lain.

Setelah kerjaan rumah selesai, anak-anak bersiap ke sekolah, sementara ibu-ibu dan segenap anggota keluarga yang tidak bersekolah, bergegas mempersiapkan diri untuk bekerja. Ada yang bekerja sebagai pedagang mlijon di pasar Kemiri, kurang lebih 3 km dari Tenggiling Sawo. Ada yang sibuk bekerja di sawah, ladang, perkebunan kopi milik PTP, dan kuli bangunan di Jember. Dan tidak lagi menjadi pemandangan aneh jika banyak perempuan Tenggiling Sawo terlihat sibuk bekerja mencangkul, menanam padi, membeli pupuk ke luar dusun, memupuk tanaman pertanian, mencari rumput dan kayu bakar, serta menjadi kuli bangunan. Dalam konteks kerjaan semacam ini, sesungguhnya hampir tidak ada pembagian dikotomis antara kerjaan laki-laki dan perempuan, terutama pemilahan kerjaan antara yang domestik dengan yang bukan domestik. Laki-laki biasa terlibat dalam kerjaan perempuan (domestik), sebaliknya perempuan juga kerap mengambil alih kerjaan yang biasa dilakukan laki-laki (bukan domestik). Kecuali kerjaan yang secara inheren melekat pada diri perempuan secara kodrati seperti melahirkan (reproduksi).

Penting dicatat bahwa tidak ada seorang perempuan Tenggiling Sawo yang berkesempatan bekerja di sektor formal seperti PNS, ABRI/POLRI, dan/atau karyawan di kantor. Jangankan kaum perempuan, kaum laki-lakinya pun yang rata-rata hanya tamatan SD, SMP dan sedikit yang SMA, tidak ada yang bekerja di sektor formal yang menjanjikan. Semuanya bekerja di sektor informal yang kurang memberikan jaminan kelayakan hidup. Sebab, hasil kerja dari sektor informal sangatlah minim. Dalam sehari, keringat yang mereka peras mulai pagi hingga petang hari rata-rata dihargai antara Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,-. Karena memang tidak ada alternatif kerjaan yang bisa mereka lakukan, kerjaan apapun termasuk kerja serabutan selalu mereka lakukan. Yang terpenting bagi mereka

adalah bagaimana menjaga agar dapur tetap bisa mengepul..

Kerja kasar semacam itu sebenarnya sudah dilakoni perempuan Tenggililing Sawo sejak jaman dahulu. Bagi mereka, kaum perempuan tidak cukup memasak, mengurus rumah, dan mengasuh anak-anaknya. Mereka sudah terbiasa kerja di luar rumah, baik di sawah, ladang, maupun perkebunan, untuk “membantu suami” mencari nafkah bagi keluarganya. Kalau suaminya sendiri yang harus bekerja, keluarga mereka tidak akan pernah bisa berkecukupan. Karena itu, suami dan istri serta seluruh anggota keluarganya bekerja bersama, saling bahu membahu, bergotong royong untuk mengatasi problema kemiskinan hidup yang menimpa keluarganya. Hanya dengan cara semacam itu, mereka dapat melakukan perlawanan atau sekedar mempertahankan kelangsungan hidupnya (*survival*) di jaman yang serba susah seperti sekarang ini (Ratna Saptari & Brigitte Holzner, 1997: 24).

Menurut kaum perempuan, sejak adanya kemajuan kehidupan, yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari kemajuan yang dipicu oleh modernisasi pembangunan di pedesaan, beban kerja mereka semakin berat saja. Kalau dahulu, mereka menghadapi persoalan kemiskinan keluarganya bersama-sama dengan suami tanpa harus meninggalkan dusun. Sekarang ini, mereka dipaksa menghadapi kerumitan hidup keluarganya itu tanpa didampingi suami. Suami hanya memainkan peran dari jarak jauh, sebatas mengirimkan uang yang jumlahnya sering tidak mencukupi. Perempuan lah yang kemudian mengambil alih peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Dalam konteks demikian, terlihat jelas betapa pembangunan yang turut memicu kemajuan di pedesaan tidak serta merta mampu mengangkat harkat dan martabat penduduk desa, laki-laki dan perempuan sederajat. Praktek pembangunan di pedesaan yang dinilai “bias” atau “buta gender” justru menempatkan kaum perempuan semakin subordinatif dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Menyadari bahwa problema kemiskinan yang dihadapi keluarganya begitu berat, maka perempuan tidak hanya bekerja keras seorang diri. Mereka, sebagaimana dikemukakan di atas, mendayagunakan segenap potensi sosial yang dimilikinya. Keluarga digunakan sebagai basis kekuatan sosial untuk melancarkan kegiatan-kegiatan produktif guna mendapatkan pemasukan (*income*). Karena itu, tidak heran jika semua anggota keluarga yang memiliki kemampuan fisik didorong untuk bekerja. Tidak ketinggalan, kaum perempuan juga mendayagunakan potensi sosial yang ada di masyarakatnya berupa tradisi gotong royong, kebiasaan saling bantu membantu, sebagai strategi atau –meminjam bahasa James C. Scott– etos *subsistensi* (*subsistence ethics*) (Astrid S. Susanto, 1995: 20).

Melalui etos subsistensi itulah perempuan Tenggiling Sawo membangun kolektivitasnya dalam menghadapi problema kemelaratan hidupnya. Tindakan saling membantu, tolong menolong, dan gotong royong, dalam berbagai hal, dinilai sangat efektif untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Melalui mekanisme ini, perempuan mampu merealisasikan kegiatan-kegiatan sosial yang membutuhkan biaya besar, seperti membayar biaya sekolah anaknya di SD dan SMP, slametan, pernikahan, sunatan, biaya penggarapan sawah, dan berbagai kegiatan besar lainnya. Bersumber dari etos subsistensi ini pula, perempuan juga kreatif merancang berbagai kegiatan sosial praktis dalam merespon berbagai problema kerumitan hidup. Arisan, iuran simpan pinjam, yakni sebuah kegiatan mirip seperti Koperasi Simpan Pinjam, merupakan bentuk-bentuk kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang dari etos subsistensi perempuan dusun.

Dalam konteks self exploitation ini, ada satu hal yang menarik untuk dikritisi lebih lanjut yakni ungkapan perempuan sendiri yang mengatakan bahwa kerja keras yang mereka lakukan itu dimaksudkan untuk "membantu kerjaan suami" agar dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sesungguhnya, ungkapan semacam ini telah menempatkan perempuan sendiri sebagai pihak yang subordinatif dalam relasinya dengan laki-laki (suami), terutama dalam sistem kehidupan keluarga, dan sistem kehidupan sosial pada umumnya. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apakah kesadaran perempuan demikian itu murni lahir dari proses-proses interaksi yang mereka lakukan dengan realitas sosial berupa kemiskinan hidup yang mereka hadapi? Satu hal yang pasti ialah bahwa pergumulan perempuan dengan realitas kemiskinan telah melahirkan kesadaran baru pada diri perempuan, sebagaimana dikemukakan di atas. Kesadaran tersebut dapat dicermati dari ungkapan perempuan sendiri yang mengatakan bahwa problema kemelaratan hidup keluarganya tidak mungkin hanya ditanggung oleh suaminya, melainkan oleh seluruh anggota keluarganya, termasuk perempuan.

Akan tetapi manakala perempuan memiliki pandangan bahwa kerja yang mereka lakukan itu sebatas membantu pekerjaan suaminya, maka terdapat sebuah sistem yang turut memainkan peran dalam mengkonstruksi pandangan subordinatif perempuan tersebut. Pertanyaannya adalah sistem sosial seperti apakah yang turut mengkonstruksi pandangan subordinatif perempuan tersebut? Dalam lingkup ataupun unit sosial yang lebih kecil, keluarga jelas memainkan peran dalam mengkonstruksi pandangan perempuan. Keluarga Tenggiling Sawo yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional-feodalnya seperti istri sebagai kanca wingking, suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki peran besar daripada perempuan

terutama dalam mengambil keputusan penting, pemahaman keagamaan tradisional-tekstualis yang mayoritas menjadi soko guru pengetahuan warga Tenggililing Sawo, dan semacamnya memberikan andil besar dalam mengkonstruksi relasi laki-laki dan perempuan di rumah tangga.

Dalam konteks pemahaman atau cara pandang perempuan yang pertama (problema kemiskinan hidup harus dihadapi bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga) dengan cara pandang kedua (kerja yang dilakukan perempuan sebatas membantu kerja laki-laki) dikaitkan dengan keberadaan keluarga sebagai sebuah sistem sosial, maka dapat dikatakan bahwa satu sisi keluarga turut berperan dalam mengkonstruksi pemahaman subordinatif perempuan dalam dunia kerja, namun di sisi lain, keluarga juga turut berperan menjadi sumber dukungan atau solidaritas perempuan dalam melakukan kerja untuk sekedar bertahan (*survive*) atau melakukan perlawanan (*resistance*) terhadap problema kemiskinan hidup keluarganya (Ratna Saptari & Brigitte Holzner, 1997: 23-25).

## *2. Negosiasi Membangun Kesetaraan*

Problema kemiskinan yang tak terperikan yang dihadapi keluarga miskin di pedusunan telah membawa kaum perempuan terjun ke berbagai sektor pekerjaan informal, baik di lingkup kerja domestik maupun non-domestik. Bagi perempuan sendiri, bekerja di sektor informal yang cenderung mengandalkan tenaga kasar seperti menjadi buruh perkebunan, buruh tani, kuli bangunan, dan semacamnya, memang bukan pilihan yang mengesankan. Meskipun sejak dahulu, mereka telah berlutut dalam lapangan pekerjaan semacam itu. Kerja kasar dan serabutan dilakukan semata-mata karena tidak ada pilihan lain yang lebih mengesankan. Kondisi kemiskinanlah yang telah menjadikan perempuan terjerembab masuk ke dalam sektor pekerjaan kasar (kerja yang mengandalkan kekuatan fisik).

Namun demikian, keberadaan perempuan dalam sektor-sektor pekerjaan non-domestik, --terlepas apakah karena sebuah keterpaksaan karena tuntutan kondisi atukah ketidakberdayaan perempuan dalam menolaknya karena tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik--, justru telah membawa dan memperluas peran mereka ke ranah publik. Sebuah peran yang tidak hanya berlutut di lingkup domestik (sumur, kasur, dan dapur), melainkan juga lingkup non-domestik yang selama ini dimonopoli oleh kaum laki-laki. Dalam lingkup kerja non-domestik, perempuan memang sebatas melakukan kerja-kerja praktis di sawah, perkebunan, ladang, dan bangunan.

Namun demikian, apabila dikalkulasi, penghasilan (*income*) yang diperoleh perempuan jauh lebih besar daripada pemasukan yang dikirimkan suaminya hasil kerja di rantauan. Meski perempuan sendiri memaknai kerja yang dilakukan sebatas membantu kerjaan suami, namun hasil yang tidak sepenuhnya kasat mata namun mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga setiap harinya, telah menjadi semacam alat negosiasi bagi dirinya untuk berdiri setara dengan suaminya dalam menopang kelangsungan hidup keluarganya. Bahkan, kekuasaan (*power*) yang dimiliki perempuan semakin terlihat jelas manakala suaminya yang sedang mudik dan hendak berangkat kembali ke daerah migran untuk bekerja dan kehabisan sugu (uang perjalanan untuk makan maupun transportasi), maka istri masih bisa mencukupi kebutuhan suami dari sisa hasil kerjanya setiap hari. Kesan bahwa selama ini perempuan cenderung sebagai pihak yang lemah yang hanya bisa menerima uang hasil kerjaan suami, pihak yang walaupun berkerja hasilnya tidak pernah melebihi hasil yang diperoleh suaminya, menjadi terdekonstruksi dengan peran yang dilakukan perempuan dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan suaminya.

Di samping itu, perempuan dusun yang berkuat dengan kerja-kerja kasar juga telah menggiring mereka untuk turut berurusan dengan persoalan yang tidak saja praktis, melainkan juga strategis. Perempuan yang mengurus sendiri pengelolaan lahan pertaniannya, mereka akan terlibat penuh dalam pengurusan pupuk, pengadaan obat-obatan, bibit pertanian, pengairan, dan pembajaan sawah. Dalam urusan pembajaan sawah, misalnya, perempuan yang berperan mencari pembajak sawah, bernegosiasi soal harganya, dan yang mengambil keputusan untuk memakai atau tidak memakai jasa pembajak yang ada. Pun demikian, dalam urusan pengadaan bibit, pupuk dan obat-obatan pertanian, perempuan tidak hanya berurusan dengan toko yang menyediakan barang-barang kebutuhan pertanian tersebut. Kerap, manakala pupuk langka, harga obat-obatan pertanian mahal, bibit tidak tersedia di toko, maka perempuan sendiri yang kemudian berurusan dengan pihak-pihak pengampu kewenangan di desanya seperti kepala desa, kepala dusun, dan aparat pemerintahan desa, apakah sekedar bertanya, mengeluh, protes, atau menyampaikan harapannya.

Keberadaan perempuan sebagai kepala rumah tangga menggantikan suaminya yang migrasi juga membawa mereka untuk memainkan peran lebih luas. Dalam urusan kebijakan rumah tangganya, kaum perempuan yang berperan mengambil keputusan seperti peran dalam pengambilan keputusan pendidikan anak-anaknya, pengambilan keputusan saat anggota keluarganya sakit, apakah

cukup diobati di rumah atau dibawa ke rumah sakit. Meski demikian, perempuan tetap berkomunikasi dengan suaminya dalam berbagai urusan rumah tangganya itu. Biasanya, suami yang berada di jauh, menyerahkan dan memercayakan semua penanganan urusan rumah tangganya itu kepada istrinya. Yang terpenting, bagaimana semua urusan dapat diselesaikan dengan baik. Kecuali urusan yang sangat penting sekali seperti rencana penjualan lahan, pembagian warisan, pernikahan, dan sebagainya, perempuan tidak bisa mengambil keputusan tanpa kehadiran suaminya secara fisik. Dalam urusan itu, perempuan disuruh menunggu kedatangan suaminya untuk mengambil keputusan.

Jadi, kerja kasar yang dilakukan perempuan dalam sektor non-domestik, yang disebabkan oleh tuntutan kondisi kemiskinan keluarganya, turut berdampak secara konstruktif pula terhadap peningkatan peran mereka dalam ranah publik. Perempuan tidak melulu berkutat dalam ranah domestik. Mereka mulai memainkan peran praktis-strategis dalam ranah publik. Sebuah pengambilan peran yang selama ini banyak dilakukan oleh kaum laki-laki kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga. Pengambilan peran oleh kaum perempuan atas kaum laki-laki, dalam proses pergumulannya, turut memantik kesadaran pada diri perempuan akan posisi, peran, dan kontribusi yang mereka berikan dalam menopang kelangsungan hidup keluarganya. Kinerja dan kerja perempuan dalam sektor ekonomi keluarga yang kerap lebih besar dari apa yang dihasilkan oleh laki-laki, peran perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangganya pada saat menjadi kepala rumah tangga, peran perempuan dalam berurusan dengan para pengambil kebijakan di tingkat desa, telah menjadi arena kontestasi bagi mereka untuk menegosiasikan peran subordinatifnya selama ini. Meski tanpa diungkapkan secara verbal, kerja-kerja praksis perempuan dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya, mulai mendapatkan pengakuan dari kaum laki-laki. Tanpa kerja keras yang dilakukan perempuan dan semua anggota keluarganya, tidak akan mungkin kelangsungan hidup keluarga mereka dapat dipertahankan. Sebuah pengakuan yang lahir dari kalangan laki-laki.

Tetapi, yang menjadi persoalan kemudian adalah, bagaimana sekembalinya suami mereka dari rantauan, apakah peran strategis yang selama ini dimainkan kaum perempuan akan kembali diambil alih oleh kaum laki-laki yang berarti pula menjadikan pola relasi suami istri/laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga kembali menjadi timpang? Secara sistemik, konstruksi keluarga tradisional yang masih sarat dengan nilai-nilai feodalistiknya, tetap akan menempatkan laki-laki dominan atas perempuan dalam pengambilan peran strategis. Terbukti, peran-

peran strategis yang selama ini mampu dilakukan perempuan seperti berurusan dengan pengambil kebijakan di desa terkait dengan kelangkaan pupuk, menghadiri undangan desa dalam pertemuan dengan dinas pertanian untuk sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan sosialisasi bibit padi, dan berbagai urusan strategis lainnya, kembali dipegang oleh suaminya. Jarang suaminya mempercayakan dan menyerahkan sebagian urusan strategis itu kepada istrinya, melainkan dihadapirinya sendiri.

Akan tetapi, proses pergumulan yang telah berlangsung sekian lama yang dilakukan perempuan tanpa suaminya, telah memberikan pengetahuan baru, pengalaman baru bagi kaum perempuan, untuk turut memberikan kontribusi pemikiran kepada suaminya. Pertimbangan-pertimbangan perempuan terbukti juga banyak diperhatikan oleh suaminya sebelum mereka mengambil keputusan. Dalam konteks demikian ini, meskipun peran dominan di ranah publik yang strategis kembali diambilalih kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan mulai aktif memberikan pertimbangan-pertimbangan, yang berarti pula aktif mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh suaminya sebagai kepala rumah tangga. Kondisi demikian ini jauh berbeda dengan sebelumnya, di mana kaum perempuan sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan persoalan-persoalan strategis yang melibatkan interaksi dengan para pengambil kebijakan di tingkat desa maupun dinas. Karena itu, kaum perempuan pada saat itu cenderung diam dan menyerahkan semua keputusannya kepada suaminya tanpa banyak memberikan pertimbangan politis yang strategis.

## PENUTUP

Gerak sosial perempuan dusun dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya itu dilakukan melalui dua mekanisme penting yaitu eksploitasi diri (*self exploitation*) dan negosiasi. Eksploitasi diri dilakukan perempuan dengan jalan kerja keras, mengerahkan segenap tenaga, kemampuan, dan waktunya, mendayagunakan segenap sumberdaya keluarga yang dimilikinya, serta potensi sumberdaya sosial yang ada di sekitarnya. Kondisi sosial dusun Tenggiling Sawo yang masih bercorak patembayan, menjadikan moral subsistensi (*subsistence ethic*) seperti gotong royong, menjadi sumberdaya sosial tersendiri yang turut dimanfaatkan perempuan guna mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya.

Satu hal yang penting dicatat pula ialah bahwa eksploitasi diri yang dilakukan perempuan Tenggiling Sawo selalu dibarengi dengan tindakan-tindakan yang bersifat negosiatif meski kerap tidak terlihat secara verbalistik. Tindakan

negosiatif ini diorientasikan terhadap sistem kehidupan sosial yang menjadikannya subordinatif, terutama secara sosial dan ekonomi. Kinerja perempuan secara sosial dan ekonomi, semisal mendapatkan penghasilan yang kerap lebih besar dari suaminya, kemampuannya menjadi kepala rumah tangga dan sekaligus tulang punggung keluarga tanpa kehadiran suami, secara semiotis menjadi penanda dekonstruktif terhadap simbolisasi perempuan sebagai pihak yang lemah, penerima nafkah, dan tidak cukup capable dalam mengurus persoalan non-domestik. Nyatanya, semua urusan yang menyangkut kelangsungan dan hajat hidup keluarga baik yang berhubungan dengan masalah domestik maupun publik dapat dilakukan perempuan dusun secara mandiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, Sita van. 1995. *Gender dan Pembangunan, Apakah yang Baru?, dalam dalam T.O. Ibroimi (ed.) Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiman, Arif. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Chandra, Tri. 2004. *Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember dalam Perubahan Zaman 1900-1970*. Makalah International Conference on Urban History, 23 Agustus.
- Djamal, Chamsiah. 1996. *Membantu Suami, Mengurus Rumah Tangga: Perempuan di Sektor Informal, dalam Mayling Oey-Gardiner dkk (ed.) Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*. Jakarta: PT Gramedia.
- Fakih, Mansour. 1999. *Gender Mainstreaming: Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan, Sebuah Pengantar, dalam Eko Prasetyo (ed.) Gender dan Perubahan Organisasi: Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik*. Yogyakarta: Insist dan Remdec.

- \_\_\_\_\_. 1996. *Menuju Dunia Yang Lebih Adil melalui Perspektif Gender, Sebuah Pengantar, dalam Julia Cleves Mosse Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Gilbert, Alan & Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Hettne, Bjorn. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kleden, Ignas. 1985. *Agama dan Perubahan Sosial, dalam Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo. 2002. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang.
- Manning, Cris & Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi dan Pengangguran di Kota, Tinjauan Umum, dalam Cris Manning & Tadjuddin Noer Effendi (ed.). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: PT. Yayasan Obor Indonesia.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Heru. 2000. *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Yulfita. 1995. *Perbedaan Antarstudi Wanita dalam Pembangunan dan Studi Wanita, dalam T.O. Ibroimi (ed.) Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sajogyo, Pudjiwati. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Pasca IKIP Jakarta dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Sartono, Kartodirdjo. 1973. *Protes Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Singapore: Oxford University Press.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, Astrid S. 1995. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta.

Schrijvers, Joke. 2000. *Kekerasan "Pembangunan" Pilihan untuk Kaum Intelektual*. Jakarta: Kalyanamitra.

Susetiawan. 1999. *Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial, dalam Moh. Mahfudz dkk. (ed.) Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press.

Wahab, Sholichin Abdul. 2000. *Tujuan, Strategi, dan Model dalam Penelitian Kualitatif, Makalah disampaikan dalam Latihan Penelitian Kualitatif Bagi Dosen PTAIS, STAIN, dan PAI pada PTU Se-Kopertais Wilayah IV*. Malang: Lemlit Unisme kerjasama dengan Depag RI.